



**PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DESA LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT MENUJU PROGRAM KOTAKU 2020**

Oleh

Danny Semidt Novianto Ridawan¹⁾, Suryawan Murtiadi²⁾ & Heri Sulistiyono³⁾

^{1,2,3}Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram

Email: semidtridawan89@gmail.com

Abstrak

Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat terletak berbatasan dengan Kota Mataram. Untuk menjaga wilayah tersebut sebagai wilayah penopang perekonomian maka dibutuhkan suatu peningkatan kualitas pembangunan dalam kawasan permukiman yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini akan tercapai dengan menerapkan prinsip perencanaan yang cepat, tepat, efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Penelitian ini difokuskan pada dua Lingkungan yang dianggap kumuh yaitu Lingkungan Labuapi Utara dan Lingkungan Labuapi. Empat kategori kekumuhan ditetapkan menurut panduan Dirjen Cipta Karya yaitu: tidak kumuh (0-19), kumuh ringan (19-44), kumuh sedang (45-70) dan kumuh berat (71-95). Kekumuhan ditentukan berdasarkan 7 (tujuh) faktor fisik yang meliputi kondisi rumah, jalan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Faktor non fisik berupa sosial dan ekonomi juga menjadi acuan dalam penilaian ini. Hasil penelitian menunjukkan Desa Labuapi mempunyai nilai 24 masuk kriteria kawasan kumuh ringan. Untuk itu perlu disusun rencana teknis berupa peningkatan jalan lingkungan sepanjang 3043 meter, saluran drainase 1513 meter, saluran pembuangan air limbah 914 meter, serta instalasi pengolahan air limbah 4 unit dengan jamban sejumlah 63 unit. Pengadaan gerobak/motor sampah dan pasokan air pada setiap RT juga harus dipenuhi sesuai dengan kondisi permasalahan. Rencana teknis ini diperlukan untuk meningkatkan kategori menjadi tidak kumuh dengan nilai 15.

Kata Kunci: Permukiman kumuh, Program Kotaku, Infrastruktur & Labuapi

PENDAHULUAN

Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terdiri atas Lingkungan Labuapi Timur, Lingkungan Labuapi Utara dan Lingkungan Labuapi. Luas area kumuh untuk Lingkungan Labuapi Utara ± 6,53 ha dengan jumlah penduduk 1663 jiwa dan Lingkungan Labuapi ± 4,57 ha dengan jumlah penduduk 1072 jiwa dengan mayoritas profesi sebagai pedangan. Masalah yang muncul ketika Desa Labuapi yang terletak di perbatasan dengan Kota Mataram yang pembangunan di wilayah tersebut cukup signifikan dikarenakan harga lahan di perkotaan sudah cukup tinggi. Kepadatan huniannya semakin tinggi yang berdampak pada berkurangnya ruang terbuka, keterbatasan lahan, sanitasi, persampahan dan ketersediaan air bersih. Selain masalah fisik, masalah non fisik seperti sosial dan ekonomipun terus bermunculan.

Untuk menjaga Desa Labuapi tersebut di perbatasan Kabupaten Lombok Barat maka dibutuhkan suatu strategi pembangunan dan peningkatan kualitas dalam kawasan permukiman yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini akan tercapai dengan menerapkan prinsip perencanaan yang cepat, tetap, efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya peran faktor-faktor fisik dan non fisik dalam pengaruhnya terhadap tingkat kekumuhan penduduk pada kawasan Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat ini. Tujuan selanjutnya adalah mendapatkan identifikasi masalah dan potensi sehingga diperoleh konsep investasi dan program peningkatan kualitas lingkungan terbaik dalam penanganan kawasan ini agar menjadi permukiman tanpa kumuh.



LANDASAN TEORI

Penelitian permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Surabaya dengan mayoritas penduduk berpenghasilan rendah di bawah UMR telah dilakukan oleh beberapa peneliti [1]. Penelitian yang berfokus pada partisipasi masyarakat ini menyimpulkan bahwa partisipasi pada saat perencanaan dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Sementara pada tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh usia, pendidikan, dan lama tinggal masyarakatnya. Tiga prioritas perbaikan yang disarankan dalam penelitian ini adalah drainase, aksesibilitas, dan sanitasi.

Hubungan pembangunan sarana dan prasarana dasar terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan di daerah perkotaan Mataram [2]. Penelitian yang berlokasi di daerah perkotaan Mataram ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembangunan sarana dan prasarana dasar secara serentak maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Sarana dan prasarana dasar dalam penelitian ini meliputi jalan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, dan ruang terbuka untuk fasilitas umum.

Konsep terbaik penanganan kawasan adalah dengan mendukung dan mengikuti program Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kawasan kumuh yang selaras dengan program (100-0-100) dari Pemerintah Pusat menuju Program Kotaku 2019 [3]. Penanganan dirumuskan meliputi program kependudukan, pengembangan perumahan dan permukiman, serta pengembangan sarana dan prasarana lingkungan. Kondisi prasarana dan sarana yang kurang memadai akan berdampak pada menurunnya fungsi lingkungan perumahan terutama menyangkut fungsi social dan ekonomi.

Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah merupakan langkah dalam menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari [4]. Perencanaan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang di perlukan guna mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan wilayah perlu

diperhitungkan kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan langkah-langkah dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan wilayah pada akhirnya akan menetapkan lokasi untuk berbagai kegiatan. Penetapan lokasi ini akan dilaksanakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Konsep perencanaan pembangunan dan penataan ruang dapat diintegrasikan dengan baik [5]. Perencanaan mempunyai fungsi sebagai alat pembelajar perubahan sosial dan bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Perencanaan sebagai alat pembelajar untuk perubahan sosial dipakai sebagai sebuah metode untuk menciptakan kesadaran sehingga terkait erat dengan solidaritas sosial. Perannya dalam mempertahankan pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common property resource*) sebagai kunci dalam pengaturan kelembagaan penataan ruang. Pengertian, fungsi dan aktor pencipta modal sosial menjadi salah satu indikator pembangunan.

Pembangunan dewasa ini lebih bersifat komprehensif dan holistik merujuk pada kualitas. Pembangunan wilayah bukan hanya dalam arti fisik semata, namun mencakup juga integrasi dari aspek-aspek sosial dan ekonomi, efisiensi mekanisme pasar dan perbaikan sistem kelembagaan. Seberapapun canggihnya perencanaan dan pembangunan wilayah, keberhasilannya hanya imajinasi belaka tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat [6].

Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat [7]. Sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Kriteria kumuh menurut Permen PU-PR no 2 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 dilihat dari [8]:



- a) Bangunan gedung;
- b) Jalan lingkungan;
- c) Penyediaan air minum;
- d) Drainase lingkungan;
- e) Pengelolaan air limbah;
- f) Pengelolaan persampahan; dan
- g) Proteksi kebakaran .

Mengingat begitu kompleknya dalam pengembangan kawasan permukiman kumuh, maka harus dibuat suatu perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan ekonomis yang menggambarkan tahapan-tahapan pembangunan berdasarkan prioritas serta dapat mengidentifikasi potensi-potensi negatif yang kemungkinan terjadi dalam pengembangan kawasan menuju Kawasan Tanpa Kumuh 2019. Program Kotaku yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan saat ini masih fokus pada rehab rumah tidak layak huni maupun pembangunan Rumah Layak huni.

Perumahan dan Permukiman dalam Kebijakan Pemerintah

Permukiman sehat, serasi dan berkualitas menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217 Tahun 2002 adalah permukiman yang berwawasan lingkungan [9]. Arti dari berwawasan lingkungan adalah sesedikit mungkin menimbulkan polusi serta hemat dalam penggunaan listrik dan air (*green environment*). Setiap warganegara mempunyai hak menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Demikian ditegaskan oleh Pemerintah dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa setiap warganegara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman [10]. Pembagian tugas dan kewenangan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah [9,10,11,12,13] yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman dituangkan

dalam banyak sekali dokumen, diantaranya adalah:

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- d) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 217/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Kualitas Permukiman.
- e) Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 1197A/51/Bappeda/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Tata Ruang dan Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Barat

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 menurut data dari BPS dikategorikan kedalam penggunaan lahan berdasarkan sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jumlah lahan yang ada seluas 86.182 ha yang meliputi: sawah 16.901 ha (19,61 %), bukan sawah 50.658 ha (58,78 %) dan lahan bukan pertanian seluas 18.623 ha (21,61 %).

Penggunaan lahan sawah terluas berada di Kecamatan Sekotong dengan luas 3.040 ha dan terkecil di Kecamatan Batulayar seluas 240 ha. Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah terluas juga di Kecamatan Sekotong 22.590 ha dan terkecil di Kecamatan Kediri seluas 322 ha. Begitu juga untuk penggunaan lahan bukan pertanian, Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan yang terluas untuk penggunaan lahan 7.415 ha dan penggunaan lahan bukan pertanian terkecil di Kecamatan Kuripan seluas 234 ha.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif. Metode penelitian deskriptif dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengikuti aturan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai standar dan landasan hukum [14].

Prosedur Pendataan

Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi kecamatan/distrik, kelurahan/desa, rukun tetangga (RT) dan masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebar dan dikumpulkan pada Lingkungan Labuapi Utara dan Lingkungan Labuapi bersama ketua RT lokasi terduga kumuh. Selanjutnya dilakukan pengisian, format isian identifikasi lokasi dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada tingkat RT, dilanjutkan dengan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa, rekapitulasi pada tingkat kecamatan/distrik, hingga rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Dengan prosedur pendataan seperti ini diharapkan hasil pendataan akan memiliki validitas dan akurasi yang tepat.

Data primer diperoleh langsung dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan permasalahan dilapangan. Rekaman kondisi lapangan dikumpulkan dalam bentuk foto-foto kondisi dignifikan. Wawancara dilakukan terhadap responden maupun ketua RT di lapangan dengan daftar pertanyaan serta kedudukan responden berdasarkan kebutuhan survei. Sementara data sekunder bersumber dari instansi terkait di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lombok Barat, dan eksisting kawasan lokasi menjadi objek penelitian ini. Perda yang terkait dengan perumahan dan permukiman, dan data dari BPS yang berupa data statistik kondisi dan penduduk setempat [15].

Pengukuran dan Analisis Data

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data, prosedur berikutnya adalah melakukan identifikasi dan pengukuran data yang sangat berguna untuk analisis data. Pengukuran kondisi lapangan menggunakan panduan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya (2016). Empat kategori kekumuhan ditetapkan dalam panduan ini yaitu: tidak kumuh (0-19), kumuh ringan (19-44), kumuh sedang (45-70) dan kumuh berat (71-95). Masing-masing kategori akan diberi penilaian berturut-turut 0, 1, 3 dan 5 untuk tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat

Analisis masalah dan potensi sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas lingkungan permukiman menuju kota tanpa kumuh. Dengan memperhatikan 7 indikator kumuh. 1) Kondisi Bangunan Gedung, 2) Aksesibilitas Lingkungan, 3) Kondisi Pengelolaan Air Limbah, 4) Kondisi Saluran Drainase dan Genangan/Banjir, 5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah, 6) Kondisi Pengelolaan Sampah, 7) Kondisi Penanganan Proteksi Kebakaran. Selanjutnya dari data yang telah diperoleh kita melakukan rencana teknis penanganan masalah-masalah yang ada dipermukiman kumuh untuk dilakukan penanganan peningkatan kualitas lingkungan permukiman guna menghilangkan masalah atau kekumuhan yang ada di wilayah sesuai dengan kondisi dilapangan. Sehingga mendapatkan perhitungan nilai kekumuhan akhir setelah dilakukan peningkatan kualitas [16].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Secara administratif Desa Labuapi mempunyai luas wilayah 217.66 Ha dengan jumlah penduduk 3.469 jiwa yang mayoritas profesinya adalah pedagang. Desa Labuapi ini terdiri atas Lingkungan Labuapi Timur, Lingkungan Labuapi Utara dan Lingkungan Labuapi.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



2031 yang tertuang pada Perda Lombok Barat Nomor 11 (2011), secara geografis Kabupaten Lombok Barat

- 115.46° – 116.20° Bujur Timur, dan
- 8.25° – 8.55° Lintang Selatan

Area ini meliputi luas daratan 805.92 km² dan luas perairan 1161.19 km². Kabupaten Lombok Barat mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Barat : Selatan Lombok dan Kota Mataram
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Peta administrasi wilayah kabupaten disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat



Analisis Faktor Fisik dan Faktor Non Fisik

Sebagaimana dinyatakan pada bahasan terdahulu, penilaian kondisi fisik disini berdasarkan Permen PU-PR no 2 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 meliputi kondisi: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Sedangkan kondisi non fisik disini meliputi kondisi social dan ekonomi. Dari kondisi fisik dan non fisik dibuat penilaian kriteria yang dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat total nilai berdasarkan variabel penilaian sebesar 24 yang menunjukkan bahwa Desa Labuapi termasuk kategori kumuh ringan. Dengan nilai

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

ketidakteraturan bangunan 1, kualitas permukaan jalan 1, ketersediaan akses aman air minum 3, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 3, sistem penegelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis 1, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis 1, sistem pengelolaan persampahan tidak yang tidak sesuai standar teknis 5, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 1 dan ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran 5.

Skenario Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh

Penetapan lokasi prioritas pada wilayah perencanaan Desa Labuapi berdasarkan beberapa sumber data diantaranya SK kumuh Kabupaten Lombok Barat tahun 2014, perhitungan numerik kekumuhan dan kondisi lapangan. Berdasarkan sumber data tersebut didapatkan RT prioritas untuk penanganan peningkatan lingkungan permukiman kumuh dengan konsep peningkatan kualitas melalui pemugaran.

Rencana pertama penataan dan penanganan rumah tidak layak huni yang bersifat rehabilitasi dengan tujuan untuk penyediaan rumah yang sesuai dengan standar rumah sehat dan ramah terhadap bencana (bencana angin, gempa, kebakaran). Hali ini dimaksudkan untuk menurunkan risiko dampak bagi penghuni yang ada ataupun disekitar bangunan, dan focus pada perencanaan struktur bangunan berupa pondasi pasangan batu kali mengelilingi kolom dan pembesian pada sloof, kolom dan ring yang baik.

Rencana kedua peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan. Penataan sesuai dengan standar teknis yaitu memiliki lebar lebih besar dari 1,5 meter dengan permukaan yang diperkeras dan memiliki saluran samping. Rencana penataan jalan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan perbaikan permukaan jalan yang rusak dengan menggunakan paving block serta meletakkan pot bunga atau vegetasi yang diletakan pada jalur hijau atau digantung dengan pola vegetasi vertical. Lokasi dan volume dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 2.



Rencana ketiga jaringan drainase lingkungan baru untuk tiap ruas jalan yang belum memiliki jaringan drainase. Normalisasi dilakukan untuk jaringan yang memiliki timbunan sampah atau sedimen yang mengambat aliran, peningkatan kualitas untuk drainase yang memiliki konstruksi buruk. Lokasi dan volume dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 3.

Rencana keempat peningkatan kualitas lingkungan dengan pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) setempat/terpusat, saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga, jamban (closet+bak air+septictank+resapan), saluran pembuangan limbah rumah tangga, industri, sarana komersial, sarana umum (*Green Water*) dan MCK Mandi+cuci+kakus, lokasi dan volume dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 4.

Rencana kelima suplai kebutuhan air bersih/air minum dari perusahaan air minum daerah. Sistem penyuplai menggunakan pipa-pipa yang ditanam dibawah muka tanah (under ground) atau di dalam gorong-gorong pada jaringan utilitas terintegrasi. Sistem jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM sudah dapat diakses melalui pipa-pipa yang ditanam dibawah tanah pada lokasi Lingkungan Labuapi utara dan Lingkungan Labuapi untuk melayani lokasi.

Rencana keenam sistem pengelolaan sampah pada lokasi prioritas dilakukan secara komunal dengan mempertimbangkan dana pengangkutan ke TPS menggunakan gerobak sampah di tanggung oleh masyarakat, lokasi dan volume dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 5.

Rencana ketujuh lingkungan perumahan dapat memanfaatkan sumur gali sebagai sumber air pada saat pencegahan, untuk jaringan pemadam kebakaran dipasang pipa-pipa hydrant pada jalur pedestrian, setiap bangunan

menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, disajikan dalam bentuk tabel yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Kekumuhan Awal Desa Labuapi

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (PENELITIAN)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	317,00	Unit	47%	1
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1				
2. Kondisi Jalan Lingkungan	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	3.903,00	Meter	45%	1
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	556,00	KK	66%	3
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	629,00	KK	75%	3
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
4. Kondisi Drainase Lingkungan	b. Ketidakterediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	4.416,00	Meter	65%	3
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	259,00	KK	31%	1
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	279,00	KK	33%	1
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	833,00	KK	99%	5
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1				
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	281,00	KK	33%	1	
	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3					
	25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1					
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	679,00	Unit	100%	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN				TOTAL NILAI		24	
71 - 95 KUMUH BERAT				TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
45 - 70 KUMUH SEDANG							
19 - 44 KUMUH RINGAN							
< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH							



Analisis Kekumuhan Akhir

Setelah dilakukan skenario peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh Desa Labuapi maka penilaian kumuh akhir menjadi kategori kawasan tidak kumuh dengan nilai 15 dimana sesuai dengan batas ambang nilai tingkat kekumuhan 71-95 kumuh berat, 45-70 kumuh

sedang, 19-44 kumuh ringan dan <19 dinyatakan tidak kumuh sesuai dengan panduan berdasarkan Permen PU-PR No 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 7 dan pada Gambar 2 yang disajikan. Serta perbandingan antara nilai kekumuhan awal dengan nilai kekumuhan akhir disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Peningkatan Jalan Lingkungan

NO	TAHUN KEGIATAN	LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME		
1	2021	Labuapi Utara	RT003-DS002	Jalan Paving Block	228.00	meter
2			RT005-DS002	Jalan Paving Block	172.00	meter
3			RT005-DS002	Jembatan Beton/Batu/ Box Culvert	1.00	unit
4			RT006-DS002	Jalan Paving Block	391.00	meter
5			RT008-DS002	Jalan Paving Block	927.20	meter
6			RT008-DS002	Jembatan Beton/Batu/ Box Culvert	5.00	unit
7			RT011-DS002	Jalan Paving Block	144.00	meter
8		Labuapi	RT001-DS003	Jalan Paving Block	380.80	meter
9			RT002-DS003	Jalan Paving Block	243.00	meter
10			RT007-DS003	Jalan Paving Block	120.00	meter
11			RT010-DS003	Jalan Paving Block	437.00	meter

Tabel 3. Rencana Peningkatan Jaringan Drainase

NO	TAHUN KEGIATAN	LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME		
1	2021	Labuapi Utara	RT003-DS002	Drainase lingkungan	200.00	meter
2			RT005-DS002	Drainase lingkungan	210.00	meter
3			RT006-DS002	Drainase lingkungan	277.00	meter
4			RT008-DS002	Drainase lingkungan	505.00	meter
5		Labuapi	RT001-DS003	Drainase Lingkungan	75.00	meter
6			RT002-DS003	Drainase Lingkungan	75.00	meter
7			RT010-DS003	Drainase Lingkungan	171.00	meter



Tabel 4. Rencana Peningkatan Jaringan Air Limbah

NO	TAHUN KEGIATAN	LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME		
1	2021	Labuapi Utara	RT003-DS002	Saluran Pembuangan Limbah rumah tangga, industri, sarana komersial,sarana umum (Green Water)	154.00	meter
2			RT003-DS002	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	8.00	unit
3			RT005-DS002	Saluran Pembuangan Limbah rumah tangga, industri, sarana komersial,sarana umum (Green Water)	133.00	meter
4			RT005-DS002	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	8.00	unit
5			RT006-DS002	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	2.00	unit
6			RT006-DS002	Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga	34.00	meter
7			RT006-DS002	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	17.00	unit
8			RT008-DS002	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	2.00	unit
9			RT008-DS002	Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga	310.00	meter
10			RT008-DS002	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	13.00	unit
11		Labuapi	RT001-DS003	Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga	100.00	meter
12			RT001-DS003	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	6.00	unit
13			RT002-DS003	Saluran Pembuangan Limbah rumah tangga, industri, sarana komersial,sarana umum (Green Water)	183.00	meter
14			RT002-DS003	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5.00	unit
15			RT002-DS003	MCK Mandi + Cuci + Kakus	1.00	unit
16			RT007-DS003	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	1.00	unit
17			RT010-DS003	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	4.00	unit



Tabel 5. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah

NO	TAHUN KEGIATAN	LOKASI		JENIS KEGIATAN	VOLUME	
1	2021	Labuapi Utara	RT003-DS002	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
2			RT005-DS002	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
3			RT006-DS002	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
4			RT008-DS002	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
5			RT011-DS002	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
6		Labuapi	RT001-DS003	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
7			RT002-DS003	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
8			RT007-DS003	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit
9			RT010-DS003	Pengadaan Gerobak/Motor Sampah	1.00	unit

Tabel 6. Rencana Peningkatan Proteksi Kebakaran

NO	TAHUN KEGIATAN	LOKASI		JENIS KEGIATAN	VOLUME	
1	2021	Labuapi Utara	RT003-DS002	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
2			RT005-DS002	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
3			RT006-DS002	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
4			RT008-DS002	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
5			RT011-DS002	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
6		Labuapi	RT001-DS003	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
7			RT002-DS003	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
8			RT007-DS003	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit
9			RT010-DS003	Penyediaan Pasokan Air (Kolam penampungan air, Sumur Dalam/Hidran)	5.00	unit



Tabel 7. Penilaian Kekumuhan Awal Desa Labuapi

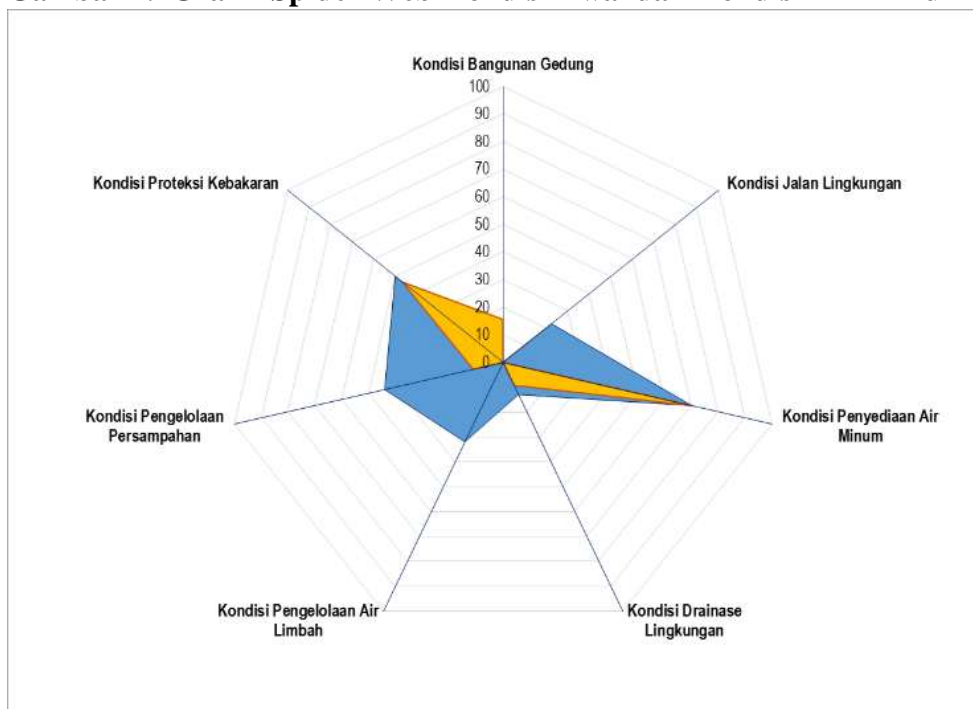
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (PENELITIAN)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	317,00	Unit	47%	1
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1				
2. Kondisi Jalan Lingkungan	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	1.053,00	Meter	12%	0
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	556,00	KK	66%	3
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	629,00	KK	75%	3
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
4. Kondisi Drainase Lingkungan	b. Ketidakterediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	3.136,00	Meter	46%	1
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	259,00	KK	31%	1
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	-	KK	0%	0
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	-	KK	0%	0
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1				
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	281,00	KK	33%	1
		51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1				
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	634,00	Unit	93%	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN				TOTAL NILAI		15	
71 - 95 KUMUH BERAT				TINGKAT KEKUMUHAN		TIDAK KUMUH	
45 - 70 KUMUH SEDANG							
19 - 44 KUMUH RINGAN							
< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH							



Tabel 8. Capaian Penanganan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

No	URAIAN	KONDISI AWAL	SKENARIO JENIS INFRASTRUKTUR TERBANGUN	KONDISI AKHIR
1	Nilai Skoring	24	Jalan Paving Block, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat, Drainase lingkungan, Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga, Jembatan Beton/Batu/Box Culvert, Jamban (closet+bak air+septictank+resapan), Jamban (closet+bak air+septictank+resapan), Jalan Paving Block, Drainase lingkungan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat, Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga, Jalan Paving Block, Drainase lingkungan, Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga, Drainase lingkungan, Jalan Paving Block, Drainase lingkungan, Drainase lingkungan, Jalan Paving Block, Gerobak/Motor Sampah, Gerobak/Motor Sampah, Gerobak/Motor Sampah	15
2	Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN		TIDAK KUMUH

Gambar 2. Grafik Spider Web Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Kumuh



PENUTUP

Kesimpulan

Faktor fisik dan non fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kekumuhan suatu kawasan. Pada penelitian ini data awal Desa

Labuapri mempunyai total nilai 24 sehingga masuk pada kriteria kawasan kumuh ringan. Pada bangunan rumah 50% tidak teratur, 53% ketidaksesuaian jalan, 72% tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, serta sebesar 76% tidak



memadainya saluran drainase, 27% sanitasi air limbah tidak memenuhi persyaratan, 41% prasarana dan sarana persampahan dengan kondisi konstruksinya tidak baik/rusak, dan 100% sarana proteksi kebakaran belum memadai. Rencana teknis peningkatan yang di rencanakan adalah infrastruktur umum diantaranya peningkatan jalan sepanjang 3.043 meter, saluran drainase 1.513 meter, saluran pembuangan air limbah sepanjang 914 meter dengan instalasi pengolahan limbah sebanyak 4 unit, jamban sebanyak 63 unit, penyediaan gerobak sampah dan pasokan air pada setiap RT guna untuk meningkatkan kualitas permukiman.

Setelah melakukan analisis dan rencana teknis peningkatan kualitas infrastruktur maka Desa Labuapi bisa dapat mengurangi kumuh pada kawasan tersebut sehingga nilai kumuh akhir menjadi 15 dengan begitu menjadi kategori tidak kumuh sesuai dengan pedoman Dirjen Cipta Karya (2016). Konsep dan program terbaik penanganan kawasan ini adalah dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder dan juga instansi pemerintah. Program ini sebaiknya menjadi acuan khususnya pemerintah Desa Labuapi dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur agar dapat tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kumuh.

Saran

Teknik perencanaan peningkatan infrastruktur untuk pengurangan kumuh bisa melibatkan peran serta masyarakat guna munculnya beberapa inovasi untuk perubahan wajah lingkungan permukiman yang ada pada 7 indikator kumuh, pendekatan partisipatif memunculkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas sehingga masyarakat bisa merasa memiliki dan menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan untuk menghindari bertambahnya permukiman kumuh kembali. Sehingga keputusan perencanaan peningkatan kualitas permukiman dapat diprioritaskan sesuai dengan permasalahan yang ada dengan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kumuh. Pengumpulan data non fisik

memerlukan informasi yang lebih lengkap dan akurat, tidak sekedar informasi dari data pendidikan dan penghasilan semata, namun juga kehidupan social dan kemasyarakatan penduduk secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Butar-Butar, S., 2012, *Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Teknik POMITS, Surabaya.
- [2] Mawarty, R.D., 2008, *Studi Mengenai Hubungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Terhadap Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh*, Universitas Sultan Agung, Semarang.
- [3] Kurniawan, Nanda., 2017, *Strategi Perencanaan Infrastruktur Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh*, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana, Univeritas Mataram, Mataram.
- [4] Tarigan, R., 2016, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- [5] Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D.R., 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- [6] Nugroho, I. dan Dahuri, R., 2012, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- [7] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jakarta.
- [8] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016, *Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*, Jakarta.
- [9] Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 217/KPTS/M/2002, *Tentang Pedoman Umum Peningkatan Kualitas Permukiman*, Jakarta.



-
- [10] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, *Tentang Perumahan dan Permukiman*, Jakarta.
- [11] Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 1197A/51/Bappeda/2014, *Tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019*, Gerung, Lombok Barat.
- [12] Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016, *Panduan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)*, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- [13] Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 11, 2011, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011-2031 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031*, Gerung, Lombok Barat.
- [14] Falatehan, A.F., 2016, *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*, Indomedia Pustaka, Yogyakarta.
- [15] Syahmuddin, 2010, *Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [16] Purwoto, B., 2016, *Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Perkampungan Nelayan Kota Mataram (Studi Kasus Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN